

**PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 130/PUU-XIII/2015 TERKAIT PEMBERIAN SPDP
KEPADAPIHAK TERLAPOR TINDAKPIDANA PADA
KEPOLISIAN RESORT KOTA BEKASI
(PRIODE TAHUN 2016 – 2018)**

PROPOSAL TESIS

Oleh :

SUKOWATI SAPTAKRIDA PAKPAHAN

201720252008



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2020**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 130/PUU- XIII/2015 Pemberian SPDP
Kepada Pihak Terlapor, Penuntut Umum, dan
Korban/Pelapor Tindak Pidana Pada Kepolisian
Resort Kota Bekasi

Nama Mahasiswa : Sukowati Saptakrida Pakpahan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720252008

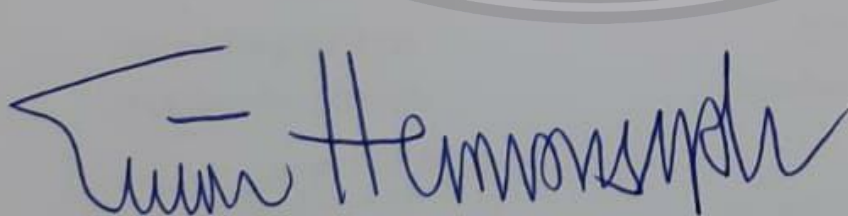
Program Studi/Fakultas : Magister Hukum / Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.

NIDN : 0319046403

NIDN : 0316077604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 130/PUU-XIII/2015 Pemberian SPDP
Kepada Pihak Terlapor, Penuntut Umum, dan
Korban/Pelapor Tindak Pidana Pada Kepolisian
Resort Kota Bekasi

Nama Mahasiswa : Sukowati Saptakrida Pakpahan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720252008

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum / Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 27 Juni 2020

Bekasi, 12 Juli 2020

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIDN : 0319046403

Penguji I : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, S.H., S.Pd., M.M.

NIDN : 0323015604

Penguji II : Dr. Yurnal, S.H., M.H.

NIDN : 1314125804

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas hukum

Dr. Lusiasulastri, S.H., M.H.

NIDN : 0127117401

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Tesis yang berjudul pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait pemberian SPDP kepada pihak terlapor, Penuntut umum dan korban /pelapor tindak pidana pada kepolisian Resort kota Bekasi (periode tahun 2016 – 2018) ini adalah benar-benar merupakan hasil karyasaya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 12 Juli 2020



Sukowati Saptakrida Pakpahan

2001720252008

ABSTRAK

SUKOWATI PAKPAHAN, 201720252008, Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terkait Pemberian SPDP Kepada Pihak Terlapor Tindak Pidana Pada Kepolisian Resort Kota Bekasi Selama Periode 2016-2018, Jumlah Halaman 100, Tahun 2019.

Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, diketahui terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam proses penyidikan, dimana perubahan tersebut meliputi adanya penambahan istilah dalam tindak pidana yaitu pelapor dan terlapor, serta perubahan terkait prosedur pemberian SPDP. Perubahan prosedur pemberian SPDP pada ketentuan Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelumnya hanya diberikan dari Kepolisian kepada kejaksaan, namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, SPDP juga wajib diberikan kepada pelapor dan terlapor. Pelaksanaannya pemberian SPDP sendiri dalam praktiknya belum cukup maksimal dimana hal ini dapat dilihat pada kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi, selama periode 2016 sampai dengan tahun 2018 pelaksanaannya hanya mencapai 17,62% pada tahun 2016, 75,61% pada tahun 2017, dan 53,62% pada Tahun 2018 sehingga penelitian ini pun memiliki tujuan untuk membahas, pelaksanaan dan kendala dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi selama periode 2016-2018. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi pendekatan normatif dan empiris. metode normatif membahas mengenai implementasi ketentuan-ketentuan hukum normatif dalam studinya terhadap peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat, sedangkan, penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan pemberian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan pada Kepolisian Resort Kota Bekasi, meskipun belum cukup maksimal, namun sudah terlaksana dengan baik, khususnya pada Penyidik Reserse unit bagian Harda, Jatanras, dan PPA pada Kepolisian Resort Kota Bekasi Selain itu khusus pada penyidik Reserse unit bagian Narkotika, perlu ditingkatkan kinerja terhadap pemberian SPDP terhadap pihak terlapor, atau pelaku tindak pidana narkotika. Adapun kendala dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/2015, dalam pemberian SPDP oleh penyidik pada Kepolisian Resort Kota Bekasi meliputi kendala yang bersifat internal dan eksternal.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, SPDP, dan Tindak Pidana

ABSTRACT

SUKOWATI PAKPAHAN, 201720252008, *Implementation of the Constitutional Court Decision Number 130 / PUU-XIII / 2015 Regarding the Provision of SPDP To Reported Party Criminal Acts at the Bekasi City Resort Police During the 2016-2018 Period, Number of Pages 100, Year 2019.*

After the Constitutional Court Decision Number 130 / PUU-XIII / 2015, it was found that there were some significant changes in the investigation process, where the changes included the addition of terms in criminal acts, namely the reporter and the reported, as well as changes related to the SPDP granting procedure. Changes to the procedure for granting SPDP in the provisions of Article 109 paragraph 1 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code previously only given from the Police to the prosecutor, but after the Constitutional Court Decree Number 130 / PUU-XIII / 2015, SPDP also must be given to the reporter and reported. The implementation of SPDP giving itself in practice is not yet maximal where this can be seen in the Bekasi City Police Office, during the period 2016 to 2018 the implementation only reached 17.62% in 2016, 75.61% in 2017, and 53, 62% in 2018 so that this research also has the aim to discuss, implement and constraints in the implementation of the Constitutional Court Decree Number 130 / PUU-XIII / 2015 related to the issuance of Notice of Investigation at Bekasi City Resort Police Station during the 2016-2018 period.

In this study the authors used a normative and empirical approach methodology. Normative methods discuss the implementation of normative legal provisions in their studies of legal events that occur in the community, whereas, empirical legal research has the object of study of community behavior.

The conclusion of this research is the implementation of the issuance of an Investigation Warrant for the Bekasi City Resort Police, although it is not yet maximal, but it has been carried out well, especially in the Investigation Investigators of the Harda, Jatanras, and PPA units at the Bekasi City Resort Police, the Narcotics section, it is necessary to improve the performance of the SPDP granting of the reported party, or the narcotics criminal. The obstacles in the implementation of the Constitutional Court's Decision Number 130 / PUU-XIII / 2015, in the granting of SPDP by investigators at the Bekasi City Resort Police include internal and external problems.

Key Words : *Constitutional Court, SPDP, and Criminal Acts*

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesehatan dan keselamatan bagi kita semua, khususnya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat waktu ,sehingga penulis bisa memenuhi persyaratan penyelesaian tugas akhir jenjang Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan Tesis ini penulis memilih judul “ **pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait pemberian SPDP kepada pihak terlapor, Penuntut umum dan korban /pelapor tindak pidana pada kepolisian Resort kota Bekasi (periode tahun 2016 – 2018).**

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyelesaian Tesis ini begitu banyak kekurangan yang masih perlu di perbaiki, namun sesungguhnya penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam persiapan dan pengadaan materi dan data serta penyusunan Tesis ini sehingga dapat terselesaikannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir jenjang Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara teknis dan materi (sebagai pembimbing teknis dan pembimbing materi) dan juga pihak-pihak yang selalu setia memberikan semangat spirit yang membuat penulis tidak mengenal lelah dan pantang menyerah, karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada :

1. Dr, Dr, Ir, H, Erwin Owan Hermansyah, SE, S.H, M.H, M.M, M.M, Inv, R.F.A selaku Dosen Pembimbing-1 Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing-2 Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas bhayangkara Jakarta Raya .
3. Seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Dosen Fakultas Pasca Sarjana fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh akademika yang telah berperan penting di Prodi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Istri yang tercinta yang selalu setia baik siang maupun malam mendampingi dalam penulisan Tesis ini tanpa mengenal lelah dan selalu memberikan semangat dorongan yang luar biasa yang tidak dapat penulis ungkapkan seluruhnya pada lembar sekripsi ini.

6. Ketiga anakku yang sangat saya sayangi dan sangat saya cintai yang selalu mendoakan papanya sebagai Mahasiswa Pasca sarjana di Prodi Magister Ilmu Hukum, hingga penulis terus semangat hingga tercapainya target penyelesaian Tesis ini sesuai yang direncanakan .
7. Rekan rekan Prodi MIH secara khusus angkatan 19 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berkontri busi baik secara teknis dan meteri sehingga semakin lengkapnya data dan informasi yang dapat diperoleh penulis dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini.
8. Buat Pimpinan dan Staf Polres Metro Kota Bekasi yang telah banyak membantu terkait data dan informasi yang diperoleh penulis sebagai sumber data ,sehingga penulis sangat puas dalam menuangkan tulisannya pada skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Saya sebagai penulis telah berusaha untuk menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik baiknya agar isi dari Tesis ini benar benar dapat dibaca ,dimengerti, dan dipahami secara baik dan benar bagi seluruh mahasiswa Prodi MIH Universitas bhayangkara Jakarta Raya dan secara khusus dapat sebagai pemenuhan syarat kelulusan dalam menyelesaikan jenjang Magister Ilmu Hukum (S2), dan penulis menyadari dalam penyelesaian Tesis ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis juga dengan senang hati mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari dosen pembimbing dan terlebih dari dosen penguji terhadap skripsi ini guna kesempurnaan pengerjaan skripsi ini dengan predikat yang terbaik.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Bekasi 11 Juni 2020

Sukowati Saptakrida Pakpahan

DAFTAR ISI

JUDUL TESIS	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Kegunaan Penelitian	6
1.4. Kerangka Pemikiran	7
1.5. Kerangka Teoritis	9
1.5.1. Teori Negara Hukum	9
1.5.2. Teori Penegakkan Hukum	10
1.5.3. Teori Tujuan Hukum Pidana	13
1.5.4. Teori Penyelidikan dan Penyidikan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1. Teori Negara Hukum	21
2.2. Teori Penegakan Hukum	22

2.3. Teori Tujuan Hukum Pidana	25
2.4. Tinjauan Umum	30
2.5. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan, dan Penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana	39
2.6. Tinjauan Tentang Penyidikan	49
2.7. Tinjauan Umum Tentang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan	50
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1. Metode Penelitian	54
3.1.1. Jenis Penelitian	54
3.1.2. Metode Pendekatan	54
3.1.3. Sumber Data	55
3.1.4. Teknik Pengumpulan Data	56
3.1.5. Teknik Analisis Data	56
3.2. Jadwal dan Lokasi Penelitian	56
3.2.1. Jadwal Penelitian	56
3.2.2. Lokasi Penelitian	57
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	58
4.1. Gambaran Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/ PUU-XIII/2015	58
4.2. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terkait Dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi Selama Periode 2016 – 2018	77
4.3. Kendala Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/ PUU-XIII/2015 Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi Selama Periode 2016 – 2018	83

BAB V PENUTUP	99
5.1. Simpulan	99
5.2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
A. Peraturan Perundang-Undangan	101
B. Buku-Buku	101
C. Jurnal, Artikel dan Internet	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

